

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah kemiskinan, nampaknya sudah menjadi gejala umum diseluruh dunia, karena itulah pemberantasan kemiskinan dimasukkan dalam agenda pertama dari 8 agenda *Millenium Development Goals* (MDG's) 1990-2015. Bagi Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan dewasa ini menjadi sangat penting karena Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita bukan sekedar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut (*exstreme poverty*); tetapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60% penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan (Totok, 2013).

Orientasi pembangunan Indonesia selama ini lebih mengarah pada pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Model pertumbuhan seperti cenderung menitik beratkan kutub-kutub pertumbuhan yang terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan difungsikan sebagai *growth pole* dalam pembangunan daerah. Sedangkan pada pertumbuhan pada daerah lain diharapkan akan ditularkan melalui efek menetes ke bawah (*trickle down effect*). Apabila *trickle down effect* tidak tercapai, maka akan terjadi ketimpangan daerah dan distribusi pendapatan yang tidak merata yang artinya tingkat angka kemiskinan sulit untuk

ditekan (Meri, 2013). Pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi bukan saja mengakibatkan berbagai bentuk ketimpangan sosial tetapi juga menimbulkan persoalan lain seperti timbulnya akumulasi nilai-nilai hedonistik, ketidakpedulian sosial, erosi ikatan kekeluargaan dan kekerabatan, lebih dari itu menyebabkan ketergantungan masyarakat (Korten, 1987 dalam Winarti, 2013).

Karena itu, mengacu pada paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995), maka pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan (Totok, 2013:25). Terlebih lagi dengan kegagalan teori dan model pembangunan yang terlalu mengagungkan pertumbuhan, banyak kalangan mengalihkan orientasi kepada pembangunan yang memusat kepada rakyat, yang didalamnya mensyaratkan optimasi sumberdaya lokal, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Istilah pemberdayaan masyarakat mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sasaran program tersebut adalah desa-desa miskin, baik yang berada di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Program ini dalam implementasinya tidak berdiri sendiri, tetapi diupayakan agar terpadu baik dengan program-program sektoral maupun regional yang kegiatannya mencakup desa-desa miskin tersebut.

Program IDT pada hakekatnya merupakan bagian penting dari gerakan nasional untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus sebagai bagian dari strategi mengembangkan ekonomi rakyat, melalui program tersebut diharapkan terjadi proses pemberdayaan masyarakat serta perubahan struktur sosial tersebut terutama dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (Sunyoto, 2004:50).

Perlu adanya sebuah strategi pembangunan untuk membuat sebuah daerah atau desa bisa berkembang mandiri tanpa harus mengharapkan bantuan dari luar baik dari swasta maupun pemerintah. Ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan mengembangkan atau menghasilkan produk unggulan, dimana produk unggulan itu tidak harus berupa hasil industri dengan teknologi yang canggih atau dengan investasi yang tinggi, tetapi bisa berupa produk lokal dengan daya saing yang handal, di samping itu, produk unggulan tersebut tidak harus lain dari pada yang lain, tetapi bisa berupa *common product* dengan berbagai keunikan (Sunyoto, 2004:11-12).

Kenyataan menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seringkali jauh meleset dari konsepnya. Pemberdayaan menjadi lebih memperdayai, upaya pengembangan kemandirian masyarakat justru lebih cenderung melestarikan ketergantungan masyarakat kepada beragam bentuk bantuan, pinjaman lunak, modal bergulir, dan sebagainya (Totok, 2013). Dalam pemberdayaan masyarakat di banyak negara termasuk di Indonesia terlalu

menekankan pentingnya peranan modal alam (*natural capital*) dan modal ekonomi (*economic capital*) moderen seperti barang-barang modal buatan manusia, teknologi dan manajemen, dan sering mengabaikan pentingnya modal sosial seperti kelembagaan lokal, norma-norma dan kebiasaan lokal. Meskipun pemberdayaan ekonomi masyarakat dirancang sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, pada kenyataannya seakan-akan terlepas dan tidak berakar dengan masyarakat itu sendiri (Mawardi, 2007 dalam Winarti, 2013). Sadjad (2000) berpendapat bahwa selama ini program pemberdayaan petani secara ekonomi masih *on farm centralism*. Mestinya pemberdayaan diarahkan supaya tumbuh rekayasa agribisnis sehingga petani desa bisa menjadi pelaku bisnis yang andal dan akhirnya bisa menjadi pusat bisnis masyarakat pedesaan yang menyejahterakan. Pembangunan harus dari hilir, yaitu pasar yang melalui komponen tengah ialah agroindustri, baru hulunya *on farm business* (Totok, 2013).

Modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Ini terkait dengan melekatnya nilai-nilai yang kuat dan tumbuhnya rasa saling percaya yang tinggi ditengah masyarakat (Fukuyama, 2002 dalam Winarti, 2013). Modal sosial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sangatlah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, seperti yang di kemukakan Inayah (2012) dalam Meri (200) kehadiran negara melalui sistem pemerintah yang baik dapat mendorong menguatnya modal sosial yang mendukung berkembangnya kepercayaan, nilai-nilai dan norma-norma yang baik

dengan menciptakan situasi yang kondusif dalam mempererat jaringan-jaringan sosial di dalam masyarakat dan merangsang tumbuhnya sikap proaktif masyarakat dalam pembangunan. Sehingga ada hubungan timbal balik antara upaya pemberdayaan dengan modal sosial. Dengan adanya modal sosial kita bisa mendapatkan banyak keuntungan (Woolcock, 1998 dalam LKPS) modal sosial sebagai informasi, *trust*, dan *norms of reciprocity* yang melekat pada jaringan sosial dengan tujuan menciptakan tindakan kolektif yang menguntungkan.

Meskipun memang untuk zaman sekarang untuk berinteraksi dengan orang lain lebih sedikit sulit atau bahkan hampir tidak ada waktu untuk menjalin sebuah hubungan relasi apa lagi untuk seseorang yang memiliki pemikiran yang tidak sejalan dengan orang lain, kadang orang berfikir untuk apa menjalin sebuah hubungan bila tidak ada untungnya. Sebaiknya pemikiran yang seperti ini harus segera dikesampingkan, namun tidak sedikit juga yang lain menjalin sebuah hubungan baik itu dalam hubungan teman, organisasi atau hubungan antar keluarga dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah bantuan di saat sedang dalam kesusahan. Ini merupakan langkah awal dimana praktek modal sosial ini akan mulai nampak bagaimana mekanismenya. Jadi dengan adanya modal sosial kita akan mendapatkan banyak bantuan informasi dan juga bantuan lainnya dari rekan kita.

Dengan modal sosial kita tidak perlu takut untuk membuat sebuah keputusan karena seperti yang di sampaikan Paldam (2000 dalam LKPS)

pilar modal sosial adalah kepercayaan (*trust*), eksistensi jaringan (*network*), dan kemudahan bekerja sama (*ease of cooperation*). Seperti juga yang dikatakan oleh Dhesi (2000) dalam LKPS bahwa *social capital* bukan merupakan *private property* dari orang yang mendapatkan manfaat darinya. Hal ini hanya akan muncul dan tumbuh kalau dilakukan secara bersama (*shared*). Sehingga *social capital* bisa dikatakan sebagai *property* dari *public good*. *Social capital* akan tumbuh dan semakin berkembang kalau digunakan secara bersama dan sebaliknya akan mengalami kemunduran atau penurunan bahkan suatu kepunahan dan kematian kalau tidak digunakan atau dilembagakan secara bersama.

Menurut Lesser (2000), modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena (1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas; (2) menjadi media *power sharing* atau pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Modal sosial, termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat

kekerasan dan kejahatan (Blakeley dan Suggate, 1997; Suharto 2005a; Suharto 2005b dalam idah, 2014).

Modal sosial sangat terlihat jelas ketika dipraktekkan di daerah pedesaan yang memang rasa gotong royong dan kepeduliannya masih kuat diantara masyarakatnya. Begitupun yang terjadi pada warga Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo yang menjadi tempat dari penelitian ini, penelitian ini difokuskan pada kelompok-kelompok usaha gula semut yang ada di Desa Hargowilis. Kabupaten Kulonprogo merupakan bagian dari daerah yang ada di D.I. Yogyakarta, ada banyak kecamatan yang berada di Kabupaten Kulonprogo, salah satunya adalah Kecamatan Kokap dimana di salah satu desa yang ada di Kecamatan Kokap menjadi tempat penelitian.

Kecamatan Kokap ini memiliki banyak sumberdaya alam yang bisa dimanfaatkan baik itu menjadi tanaman pengisi lahan kebun mereka dan hasilnya yang bisa diolah untuk menambah penghasilan. Kecamatan Kokap yang menjadi bagian dari Kabupaten Kulonprogo ini menjadi Kecamatan yang memiliki jumlah produksi hasil dari tanaman kelapa paling banyak, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut merupakan tabel mengenai luas tanaman, luas tanaman kelapa yang menghasilkan, dan jumlah produksi tanaman kelapa perkebunan per Kecamatan di Kabupaten Kulonprogo.

Tabel 1.2
Luas Tanaman Kelapa, Luas Tanaman yang Telah
Menghasilkan dan Jumlah Produksi Tanaman Kelapa
Tahun 2008-2013

Kecamatan	Luas Tanaman (Ha)	Tanaman yang Menghasilkan (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
Temon	1.389,20	1.247,39	1.645,15
Wates	1.283,00	1.145,15	1.412,52
Panjatan	1.925,66	1.836,48	2.895,87
Galur	2.332,00	2.196,26	3.377,55
Lendah	1.669,46	1.460,26	3.377,55
Sentolo	1.125,57	1.042,06	1.255,83
Pengasih	1.683,00	1.580,56	2.023,48
Kokap	3.015	2.780,36	3.621,46
Girimulyo	951,80	846	975,84
Nanggulan	1.052,23	904,44	1.167,14
Kalibawang	803,00	738	849,34
Samigaluh	950	800	1.158,21
2013	18.179,92	16.576,96	22.298,14
2012	18.070,48	16.021,96	29.584,16
2011	17.955,49	15.479,50	29.292,45
2010	17.884,21	15.485,09	29.966,24
2009	17.741,36	14.864,88	28.568,29
2008	17.702,63	14.827,70	26.925,00

Sumber : BPS (Kabupaten Kulonprogo Dalam Angka 2014)

Seperti yang bisa dilihat pada tabel 1.2 diatas, kita bisa melihat bahwa dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Kulonprogo, hanya Kecamatan Kokap yang memiliki jumlah produksi pohon kelapa paling banyak yaitu sebesar 3.621,46 Ton. Meskipun Kecamatan Kokap hanya memiliki luas tanaman sebesar 3.015 Ha, ini tidak membuat jumlah produksinya sedikit, namun dengan luas tanaman yang tidak besar,

Kecamatan Kokap mampu menghasilkan lebih banyak kelapa yang dihasilkan dari 2.780,36 Ha tanaman yang dimiliki dan disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Dengan jumlah pohon kelapa tersebut, tentu akan mendatangkan keuntungan bila dimanfaatkan dengan benar. Seperti yang bisa dilihat dalam tabel diatas, menunjukkan bahwa Kecamatan Kokap menjadi tempat yang menghasilkan produks kelapa cukup banyak, ini didapat dari beberapa sentra industri pengolahan yang ada di Desa-desa di Kecamatan Kokap yang mengolah hasil kelapa menjadi sebuah barang yang bernilai. Hal tersebut bisa dimulai dengan membuat sebuah sentra industri pengolahan kelapa, baik itu berupa kelompok usaha kecil. Di Kabupaten Kulonprogo yang terdiri dari 12 Kecamatan, Kecamatan Kokap memiliki jumlah unit usaha, sentra usaha dan jumlah tenaga kerja yang paling banyak, berikut adalah tabel banyaknya sentra industri yang sudah dibina dirinci menurut Kecamatan di Kuabupaten Kulonprogo.

Tabel 1.3
Banyaknya Sentra Industri, Unit Usaha dan Tenaga Kerja
yang Sudah Dibina Tahun 2008-2013

Kecamatan	Jumlah Sentra	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
Temon	-	-	-
Wates	6	83	264
Panjatan	3	39	143
Galur	4	58	138
Lendah	13	416	864
Sentolo	7	303	668
Pengasih	9	235	408
Kokap	11	3.110	6.616

Girimulyo	4	56	118
Nanggulan	5	78	197
Kalibawang	7	801	1.506
Samigaluh	1	27	57
2013	70	5.206	10.979
2012	83	3.909	9.273
2011	81	2.091	4.957
2010	84	3.959	9.386
2009	93	4.071	12.977
2008	92	4.043	12.905

Sumber : BPS (Kabupaten Kulonprogo Dalam Angka 2014)

Seperti yang sudah dilihat pada tabel 1.3 diatas, bila semua hasil kelapa yang dihasilkan di Kecamatan Kokap bisa dimanfaatkan dengan baik, maka hal tersebut akan bisa mendatangkan keuntungan baik itu keuntungan berupa materi atau juga meningkatnya lapangan kerja. Seperti yang bisa dilihat pada tabel 1.3 diatas, jumlah unit usaha di Kecamatan Kulonprogo adalah yang paling banyak yaitu sebesar 3.110 dimana ini membuktikan bahwa sentra usaha ini bisa dijadikan alasan bahwa sumber daya yang dimiliki Kecamatan Kokap dimanfaatkan dengan baik. Lapangan pekerjaan yang tercipta dari banyaknya sentra usaha juga mengalami peningkatan, ini terbukti dari meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dimiliki Kecamatan Kokap yaitu sebesar 6.616.

Tidak ada alasan bila Kecamatan Kokap tidak memiliki sumberdaya sendiri dalam pengolahan pohon kelapa. Desa Hargowilis yang merupakan bagian dari Kecamatan Kokap tidak kalah dengan desa lain dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang dimilikinya, warga desa tersebut memanfaatkan nira dari hasil kebun kelapa kemudian diolah

menjadi gula semut. Gula semut tersebut sudah lama menjadi sumber penghasilan warga Desa Hargowilis dimana sebelumnya nira tersebut diolah menjadi gula cetak. Untuk menambah pendapatannya, warga mengembangkan hasil nira menjadi gula semut. Dengan berkembangnya hasil produksi gula semut tersebut, masyarakat mempunyai inisiatif dan juga atas bantuan dari pihak luar, terbentuklah beberapa kelompok usaha gula semut, dimana kelompok ini menaungi beberapa warga desa Hargowilis dalam proses pendistribusian atau pemasaran gula semut tersebut. Dengan adanya Kelompok-kelompok usaha gula semut diharapkan bisa meningkatkan pendapatan anggotanya yang tergantung pada sumberdaya kelapa yang ada di Desa tersebut.

Sebelum membuat gula semut seperti sekarang ini, anggota kelompok-kelompok Usaha gula semut tersebut mengolah nira kelapa menjadi gula cetak, namun dengan seiringnya waktu dan tuntutan permintaan pasar untuk menciptakan produk baru, produk inovasi baru, maka kelompok usaha ini dibantu oleh pihak luar menciptakan gula semut. Bahkan dengan adanya gula semut, jumlah produksi dan pemasaran mereka meningkat, terbukti dengan adanya permintaan dari luar negeri yang tertarik dengan gula semut tersebut. Disinilah peran Kelompok-kelompok Usaha gula semut memasarkan dan menampung semua hasil produksi dari para anggota kemudian dipasarkan kepada masyarakat luas. Terlebih lagi ketika modal sosial menjadi landasan utama dalam proses berjalannya kelompok tersebut.

Alangkah lebih baiknya jika sebuah perubahan dimulai dari apa yang sudah dimiliki, juga tidak lupa untuk memperhatikan dimensi sosial kultur dan memperhatikan sumberdaya lokal. Sebagai desa yang ada di dataran tinggi, banyak tumbuh berbagai pohon seperti kopi dan kelapa, dengan memanfaatkan salah satu sumber daya alamnya yaitu pohon kelapa, di harapkan kelompok-kelompok Usaha gula semut yang ada di desa Hargowilis bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan pohon kelapa sebagai sumber utama penghasilan mereka.

Menurut Hutomo (2000) dalam Winarti (2013) mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih efektif jika dilakukan dengan pendekatan kelompok. Akumulasi kapital akan lebih mudah dilakukan bersama-sama. Begitu pula dengan masalah distribusi hasil produksi dan input produksi, melalui kelompok dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Totok, 40:2013).

Terkait dengan mekanisme sosial, sebagian besar masyarakat di Indonesia dikenal sebagai masyarakat di dunia yang mempunyai tradisi komunitarian paling kuat (Scott, 1976). Tradisi komutarian tersebut antara

lain diwujudkan dalam bentuk *social relationship* yang kuat, masyarakat kita telah banyak berinovasi dalam menciptakan *social relationship* yang memberikan manfaat kepada warganya. Para ahli telah mengacu *social relationship* sebagai suatu *networking* yang secara spesifik sering disebut dengan terminologi *social capital*.

Walaupun masih belum ada kesepakatan yang baku tentang pengertian *social capital*, namun sudah ada saling pengertian bahwa *social capital* memiliki peran yang penting dan positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Transaksi-transaksi ekonomi akan berjalan dengan lebih efisien jika didukung dengan *social relationship* yang mantap dan kuat. Secara umum kemampuan *social relationship* di pedesaan kita masih kuat (Totok, 2013:79).

Begitu juga yang terjadi di dalam kelompok usaha gula semut di desa Hargowilis, dimana pada mulanya terbentuk karena adanya kesadaran dari masing-masing anggota untuk saling membantu dalam hal perekonomian keluarga, didorong lagi dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang membantu memajukan dan mengembangkan kelompok tersebut dalam hal pengolahan dan pemasaran gula semut yang menjadi sumber penghasilan di desa tersebut. Dengan rasa kekeluargaan dan modal sosial yang dimiliki dalam diri masing-masing anggotanya, diharapkan mampu menjadi salah satu penopang dan sumber pendapatan yang dimiliki setiap anggotanya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin apa yang sudah dipaparkan diatas dibuktikan dengan melakukan penelitian untuk membuktikan apakah ada kaitan antara modal sosial dengan dibentuknya Kelompok-kelompok usaha dalam mengolah gula semut dalam meningkatkan kehidupan dari sisi ekonomi anggota kelompok usaha yang merupakan masyarakat Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo. Namun penelitian ini hanya akan memfokuskan pada pertanyaan sejauh manakah peranan modal sosial terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang merupakan anggota kelompok usaha gula semut di Desa Hargowilis.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui apakah peran modal sosial mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi anggota kelompok gula semut di Desa Hargowilis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bisa digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya dengan meningkatkan manfaat bila kita bisa menggunakan modal sosial menjadi sebuah jawaban didalam menjalankan sebuah kegiatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi *lesson learned* bagi peningkatan kehidupan di sisi ekonomi masyarakat

dimana modal sosialpun seharusnya menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan disamping modal alam dan modal ekonomi.